



KABAR

EDISI 1
JAN - FEB 2026

GOLKAR

BALI

REKOMENDASI

RAPIMNAS

GOLKAR

**Terkait Pilkada
Lewat DPRD,**

**Ketua Golkar Bali:
Demi Kepentingan
Negara
dan Kualitas
Pemimpin Daerah**

GUNG COK :

**Golkar Bali
Dukung
Kepala Daerah
Dipilih DPRD
Kami Ikut
Perintah Partai**



Gde Sumarjaya Linggih
Ketua DPD I Golkar Prov. Bali

www.kabargolkar.com



*Demokrasi bukan tujuan,
Tapi alat untuk wujudkan
rakyat sejahtera*



Gde Sumarjaya Linggih
Ketua DPD I Golkar Prov. Bali

Rekomendasi Rapimnas Golkar Terkait Pilkada Lewat DPRD, Ketua Golkar Bali: Demi Kepentingan Negara dan Kualitas Pemimpin Daerah

KabarGolkar - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan salah satu rekomendasi strategis, yaitu mengusulkan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rekomendasi tersebut dinilai sebagai langkah untuk memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus memperbaiki kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari upaya menempatkan kedaulatan rakyat secara lebih substantif, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam keseluruhan proses politik.

Selain rekomendasi terkait Pilkada, Rapimnas Golkar juga memberikan perhatian serius pada penyelenggaraan Pemilu. Menurut Bahlil, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan fokus pada pembenahan aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara, serta tata kelola pemilu, guna mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, menyatakan kesiapan penuh Golkar Bali dalam mengikuti kebijakan yang nantinya diputuskan di tingkat nasional.

"Apa pun kebijakan yang nantinya diambil, kami siap. Itu yang pertama. Yang kedua, semua ini berangkat dari kepentingan rakyat," kata Demer. Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali ini menjelaskan bahwa sikap Golkar didasarkan pada kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada langsung, baik dari sisi proses maupun hasil yang dihasilkan.

"Setelah kami menelaah secara menyeluruh, baik dari proses maupun hasil atau output Pilkada langsung, kami di Partai Golkar telah sepakat untuk mengarah kembali pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD," tegasnya.

Menurut Demer, terdapat banyak pertimbangan yang melandasi sikap tersebut. Namun ia mengakui, kebijakan ini tidak akan lepas dari pro dan kontra di ruang publik.

"Ada banyak alasan di balik sikap ini. Jika saya uraikan satu per satu, tentu panjang. Ke depan, pasti akan ada perdebatan antara pihak yang setuju dan tidak setuju. Namun, kami telah mengkajinya secara mendalam, termasuk potensi kerugian bagi masyarakat maupun negara," jelasnya.

Demer juga menyadari bahwa keputusan ini tidak selalu populer, baik di mata masyarakat Bali maupun bagi Partai Golkar sendiri. Namun, Golkar memilih menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas pertimbangan elektoral semata.

"Keputusan ini memang tidak selalu populer. Bisa saja dinilai kurang pas, baik di Bali maupun bagi Partai Golkar secara umum. Namun demi kepentingan negara, demi kebaikan yang lebih besar, dan demi menghasilkan pemimpin yang lebih baik ke depan, itulah tujuan Partai Golkar," ungkapnya.



Ketua DPD Golkar Bali / Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih



Sumarjaya Linggih akan bawa Golkar Bali jadi Partai moderen

<https://bali.antaranews.com/>



Ia menegaskan bahwa sikap Partai Golkar tersebut sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai dasar partai. Ia menyebut, arah kebijakan itu berlandaskan pada AD/ART Partai Golkar hingga nilai-nilai ideologis yang tercermin dalam Mars Partai Golkar. Menurut Demer, jika dalam prosesnya terjadi penurunan simpati masyarakat, hal tersebut dipandang sebagai konsekuensi politik yang harus diterima demi kepentingan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

sumber : <https://kabargolkar.com>



Klik untuk kembali ke daftar halaman



Golkar Bali Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD:

KAMI IKUT PERINTAH PARTAI

Denpasar - detik.com, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Anak Agung Bagus Tri Candra Arka alias Gung Cok mendukung usulan kepala daerah agar dipilih melalui DPRD. Gung Cok yakin usulan penghapusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tersebut akan disetujui oleh rakyat.

"Pastinya kami ikuti perintah partai," kata Gung Cok saat ditemui di Kantor DPRD Bali di Denpasar, Rabu (7/1/2026).

"Hasil rapim Golkar di Jakarta, Partai Golkar mendukung pemilihan (kepala daerah) dilakukan DPRD," imbuhnya.

Gung Cok menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak akan menjadikan demokrasi Indonesia mundur. Menurutnya, mekanisme itu dapat menekan anggaran ketimbang menggelar Pilkada langsung.

“Toh kami juga dipilih oleh masyarakat, kami wakil masyarakat di DPRD, berarti kami mewakili amanah masyarakat. Kan sama saja”

Anak Agung Bagus Tri Candra Arka
Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali

Ia juga tidak khawatir wacana tersebut membuat rakyat dikhianati.

Menurut Gung Cok, kader Golkar siap menjelaskan kepada konstituen terkait wacana yang sedang digodok DPR RI itu perintah Partai".

"Kami jelaskan kenapa, punya waktu banyak untuk menjelaskan nanti," imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah parpol mendukung usulan pemilihan kepala daerah agar dikembalikan ke DPRD dengan alasan ongkos politik Pilkada langsung yang mahal. Usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD muncul se usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 Partai Golkar. Rapimnas Golkar itu menghasilkan keputusan salah satunya terkait Pilkada melalui DPRD hingga pembentukan koalisi permanen. (iws)

KELEBIHAN

- Kepala daerah lebih dekat dengan konstituentnya
- Partisipasi politik warga tinggi

KEKURANGAN

- Mandat dan legitimasi politik lebih kuat
- Daya tarik calon lebih penting ketimbang partai penguasa
- Rawan disusupi kepentingan pemodal
- Aktor yang kurang bersaing

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PILKADA LANGSUNG

■ Ciptakan konflik horizontal maupun vertikal

■ Biaya politik tinggi, kampanye harus door to door

■ Penyalahgunaan APBD, calon petahana gunakan fasilitas negara

■ Manipulasi suara

"Kekurangannya orang yang memiliki dana besar punya peluang besar terpilih"

Kartiko Nurintias, Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham

Sumber: Kabar24, BeritaSatu, - R55

[pinterpolitik.com](#) [pinterpolitikdotcom](#) [pinterpolitik](#) [pinterpolitik](#)

PILKADA: LANGSUNG ATAU LEWAT DPRD?

VOTE

"Kalau kita lihat sekarang ini semangatnya antikorupsi, tapi tanpa sadar kita mengkonstruksi sistem (pemilihan langsung) yang membuka peluang korupsi itu terjadi."

-Yusril Isha Mahendra

Wacana untuk menghapus Pilkada langsung kembali mengemuka

- Ketua DPR merencanakan agar Pilkada langsung dihapuskan
- KPK membantah mengusulkan wacana tersebut
- Pilkada nantinya akan dilakukan oleh DPRD
- Dianggap lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya
- Dilakukan untuk menekan biaya politik

Ukulan Pilkada oleh DPRD pernah disahkan di tahun 2014 melalui manuver Koalisi Merah Putih

- Publik begitu geram ketika Pilkada dilaksanakan melalui DPRD
- Dianggap bermudarat demokrasi
- Dibatalkan melalui Perppu

Sumber: Berbagai Sumber - Y14

[pinterpolitik.com](#) [pinterpolitikdotcom](#) [pinterpolitik](#) [pinterpolitik](#)

PILKADA LANGSUNG BANYAK MUDARAT?

"Menurut saya, (Pilkada Langsung) untuk dipertimbangkan kembali karena mudaratnya sangat banyak."

-Maftud MD

KELEBIHAN

- Kepala Daerah terpilih diyakini telah mewakili rakyat mayoritas
- Kepala Daerah terpilih punya legitimasi tinggi karena melibatkan rakyat sehingga lebih berkualitas

KELEMAHAN

- Mengeluarkan biaya yang besar
- Kerap terjadi konflik horizontal
- Partisipasi masyarakat rendah

Maraknya praktek politik uang

Terbentuknya dinasti politik

Kepala daerah korupsi untuk mengembalikan modal

"Seseorang yang mau ikut Pilkada, habiskan kalau mau jujur pilihlah minor. Padahal tidak sesuai dengan apa yang didapat. Intinya ini masih dalam tahap diskusi."

Mendagri Tjahjo Kumolo

"Kalau nanti hasil kesimpulan evaluasi pemerintah dan DPR melihat pilkada langsung ini baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat dan baik bagi demokrasi kita ya kita lanjutkan."

Ketua DPR, Bambang Soesatyo

Sumber: Berbagai Sumber - K12

[pinterpolitik.com](#) [pinterpolitikdotcom](#) [pinterpolitik](#) [pinterpolitik](#)



Debat Adian Napitupulu Ray Rangkuti Dan Irawan Golkar Soal Pilkada Dipilih DPRD

Ahmad Irawan : Gagasan Pilkada tidak langsung bukan berangkat dari perhitungan untung rugi Partai Golkar tetapi bertujuan untuk penataan dan penyederhanaan dengan melalui evaluasi dan kajian panjang.



Pematangan desain sistem pilkada ini dianggap menjadi upaya Golkar menjaga teknokrasi dan bersiap menyambut pembahasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI, M. Sarmuji

Fraksi Golkar DPR RI Gelar Diskusi terkait Sistem Pilkada Tak Langsung

Fraksi Partai Golkar DPR RI menggelar FGD internal terkait sistem pemilihan kepala daerah yang digelar di ruangan Fraksi Partai Golkar DPR RI, pada Rabu, (21/1/26). Agenda tersebut menghadirkan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dan peneliti bidang politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro.

Keduanya memaparkan analisis tentang sistem pilkada tak langsung yang diusulkan oleh Partai Golkar. Namun, baik Yusril maupun Siti, enggan menjelaskan isi diskusi tersebut. "Kan, tertutup," kata Yusril saat ditemui di Kompleks DPR di Jakarta pada Rabu, (21/1/26).

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa kehadiran Yusril bukan dalam kapasitasnya sebagai menteri. Golkar mengundang Yusril untuk meminta pendapatnya sebagai ahli hukum tata negara.

"Bukan (sebagai menteri). Kan dia pakar hukum tata negara," kata Sarmuji.

Dalam diskusi tersebut, tampak hadir pula Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sari Yulianti, Waketum Partai Golkar, Idrus Marham, Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Sejumlah anggota DPR dari komisi II juga hadir seperti Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dan Ahmad Irawan.

Sarmuji menjelaskan tujuan dari diskusi kelompok terarah ini adalah mematangkan konsep sistem pilkada lewat DPRD yang diusung oleh Golkar.

Partai Golkar mengusulkan dua opsi model pelaksanaan pemilihan lewat DPRD.

Opsi pertama adalah pemilihan tak langsung yang dilaksanakan di semua daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Opsi kedua adalah pemilihan asimetris, yakni pilkada lewat DPRD hanya dilaksanakan di daerah tertentu dengan mempertimbangkan kerawanan, kondisi geografis dan literasi politik konstituen.

Sarmuji menuturkan bahwa Golkar teguh mendorong dua opsi tersebut. "Diskusi ini menyempurnakan desain yang sudah kita rencanakan tentang pilkada. Jadi kita memastikan bahwa setiap usulan kita itu hasil dari kajian yang mendalam," kata Anggota Komisi VI DPR itu.

Sarmuji menegaskan bahwa ke depan Partai Golkar akan kembali menggelar diskusi terarah dengan mengundang tokoh-tokoh nasional dengan latar belakang kepakaran di bidang politik pemerintahan hingga konsitusi. Salah satunya yang dijadwalkan untuk memberi masukan adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva.

Pematangan desain sistem pilkada ini dianggap menjadi upaya Golkar menjaga teknokrasi dan bersiap menyambut pembahasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memastikan bahwa UU Pilkada tidak akan dibahas pada tahun ini.

"(Desain sistem pilkada tak langsung) itu terus kita sempurnakan supaya pada saat nanti misalkan dibahas, kita sudah punya konsep yang betul-betul utuh dan komprehensif," kata Sarmuji.

Selengkapnya: <https://kabargolkar.com>





PILKADA MELALUI DPRD

Miliki Landasan Konstitusional Yang Kuat

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rifqi menjelaskan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, tanpa menyebutkan secara eksplisit mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.

“Dari optik konstitusional, kata ‘demokratis’ dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bisa ditafsirkan sebagai demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Karena itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai bentuk demokrasi tidak langsung memiliki dasar konstitusional yang kuat,” kata Rifqi.

Ia menambahkan, konstitusi juga secara tegas tidak memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilihan umum sebagaimana

diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yang hanya mengatur pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD.

“Karena pemilihan kepala daerah tidak berada dalam rezim pemilu, maka ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD sejatinya tidak perlu diperdebatkan dari aspek konstitusional,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Namun demikian, Rifqi menegaskan bahwa kepala daerah tidak bisa ditunjuk langsung oleh Presiden karena mekanisme penunjukan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Ia mencontohkan wacana yang berkembang terkait gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Penunjukan oleh presiden tidak bisa dilakukan karena sifatnya tidak demokratis,” tegasnya.

Sebagai jalan tengah, Rifqi menyebutkan adanya opsi formula hibrida, yakni Presiden mengajukan satu hingga tiga nama calon gubernur kepada DPRD provinsi untuk kemudian dilakukan uji kelayakan dan dipilih satu nama.

“Formula ini merupakan konsekuensi dari sistem presidensial yang kita anut, yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUD 1945,” jelasnya.

Terkait apakah mekanisme pilkada melalui DPRD akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, Rifqi menjelaskan bahwa Prolegnas 2026 memang mengamankan Komisi II DPR RI untuk menyusun naskah akademik dan RUU revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun, ia menekankan bahwa UU Pemilu hanya mengatur dua jenis pemilihan, yakni pemilu presiden dan pemilu legislatif. Sementara itu, pemilihan kepala daerah diatur dalam rezim berbeda melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Secara kelembagaan, Komisi II DPR RI siap membahas berbagai usulan mekanisme pemilihan kepala daerah yang berkembang saat ini,” kata Doktor Ilmu Hukum dari UII Yogyakarta ini.

Ia membuka peluang agar pembahasan tersebut dilakukan melalui penataan menyeluruh sistem kepemiluan nasional, termasuk kemungkinan kodifikasi hukum pemilu dan pemilihan.

“Jika memungkinkan dan tugas itu diberikan kepada Komisi II, maka pembahasan bisa dilakukan dalam bentuk kodifikasi hukum kepemiluan atau hukum pemilihan. Ke depan, bisa saja revisi UU Pemilu digabung dengan revisi undang-undang lain, termasuk Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk menata pemilu dan pemilihan di Indonesia secara lebih komprehensif,” pungkasnya. (sumber : jdih.dpr.go.id/ssb/rdn)



Demokrasi Harus Kita Bikin Minim Ongkos Politik

Pesan Presiden Prabowo di Istora Senayan saat hadir dalam Acara Puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Jumat, 5 Desember 2025.

“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik, supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit”





PARTAI GOLKAR
DIDIRIKAN UNTUK
PERTAHANKAN
IDEOLOGI
PANCASILA

BAHLIL LAHADALIA
Ketua Umum DPP Partai GOLKAR

Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa partainya didirikan oleh para pendahulu untuk mempertahankan ideologi Pancasila.

Hal ini diucapkan Bahlil ketika membuka acara Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR yang akan dihadiri seluruh Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG), di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/2/2026).

"Jadi menurut saya, Partai Golkar sebagai partai yang didirikan oleh para pendahulu kita yang salah satu tujuannya adalah mempertahankan ideologi Pancasila, harus menjaga kebhinekaan sebagai bagian dari aset negara terbesar kita," kata Bahlil

Bahlil mengajak kepada para kader menengok kembali perjalanan panjang bangsa Indonesia yang menyatukan wilayah Nusantara yang terdiri dari 17.400 pulau, 1.413 suku, dan 718 bahasa bukanlah perkara mudah.

"Lahirnya kesadaran berbangsa, mulai dari Kebangkitan Nasional 1908 hingga Sumpah Pemuda 1928, adalah mukjizat dan buah dari kebesaran jiwa para pendahulu. Sumpah Pemuda itu adalah perekat untuk mengikat kita dalam satu perspektif yang sama. Bahwa persatuan untuk mengabaikan perbedaan adalah merupakan sebuah langkah menuju untuk mencapai kemerdekaan," jelas Bahlil.

Bahlil pun mewanti soal potensi perpecahan jika masyarakat atau elite politik masih mempersoalkan latar belakang kedaerahan di era modern ini.



Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia ketika membuka acara Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR yang dihadiri seluruh Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG), di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/2/2026).

Ketum Golkar Minta Kadernya Perkuat Persatuan di Tengah Dinamika Politik

Ia menekankan kepada para kadernya untuk menjaga kebhinekaan yang merupakan bagian dari aset terbesar negara.

"Fondasi Bhinneka Tunggal Ika sudah final dan tidak seharusnya didebatkan kembali jika bangsa ini ingin terus maju. Jadi, kalau hari ini bangsa ini masih memperdebatkan antara satu dari NTT, satu dari Sulawesi, satu dari Aceh, satu dari Papua, satu dari Maluku, dan satu dari Kalimantan, maka tunggu saatnya saja (perpecahan)," papar Bahlil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut lalu menceritakan kehidupan di kampung halamannya, di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Di sana, dikenal semboyan persaudaraan "Tiga Tungku Satu Batu". "Kami di Papua, khususnya di kampung saya, di Fakfak, saking toleransinya, itu Kakak kami satu keluarga itu ada namanya 'Satu Tungku Tiga Batu'. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan. Dalam satu rumah," tandasnya.

Dikutip dari beberapa sumber



Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kiri) memberikan buku kepada Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng (kedua kanan), serta disaksikan oleh Bendahara Fraksi Partai Golkar MPR RI Ade Rosi Khoerunnisa (kanan) pada pembukaan Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/2/2026).





Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN).

Jabatan Baru Bahlil KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat tugas dan kewenangan baru sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN). Pelantikan Bahlil sebagai Ketua DEN terlaksana di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Pelantikan Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional berdasarkan Keppres 134 P Tahun 2025 tentang pengangkatan anggota DEN dari pemangku kepentingan dan Keppres 6 P Tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan DEN dari unsur pemerintah.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan alasan pengangkatan ketua harian dan anggota DEN dilakukan langsung oleh Prabowo. Ia menyebut target swasembada energi menjadi prioritas pemerintah tahun ini.

"Jadi, kenapa ini langsung Bapak Presiden yang akan melantik, karena sekali lagi, bahwa masalah energi menjadi salah satu prioritas dari bangsa kita, dari pemerintah. Setelah kita

berhasil mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu satu tahun, terutama dalam hal beras, kita ingin mengejar yang berikutnya adalah kerja keras untuk mencapai swasembada energi," kata Prasetyo di Istana.

Keanggotaan DEN Libatkan Menteri Sektor Energi

Struktur Dewan Energi Nasional dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua. Dalam periode 2026-2030, Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua DEN, dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian DEN.

Menteri-menteri yang menjadi anggota DEN ialah Mentan Andi Amran

Sulaiman, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Mendikti Saintek Brian Yulianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol.

Sementara itu, kedelapan anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan ialah Johni Jonatan Numberi, Mohamad Fadhil Hasan, Satya Widya Yudha, Sripeni Inten Cahyani, Unggul Priyanto, Saleh Abdurrahman, Muhammad Kholid Syeirazi, dan Surono

Komitmen Bahlil Usai Dilantik

Bahlil mengatakan DEN di bawah kepemimpinannya hendak mewujudkan swasembada, ketahanan, dan kemandirian energi. Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut akan memprioritaskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN (Dewan Energi Nasional)," ucap Bahlil setelah dilantik.

Bahlil menegaskan sektor energi menjadi perhatian bagi Presiden. Hal ini sejalan dengan Asta Cita, khususnya pada poin ketahanan energi dan ketahanan pangan.

"Ini adalah sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden, yang mempunyai perhatian khusus dalam rangka menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan. Karena dalam berbagai kesempatan di Asta Cita nomor dua, Bapak Presiden selalu berbicara tentang ketahanan energi dan ketahanan pangan," katanya

Lebih lanjut Bahlil menyebut Dewan Energi Nasional akan segera menggelar rapat perdana dan melaporkan kepada Presiden untuk melaksanakan sidang pertama. Fokus utama yang menjadi arahan Presiden, lanjut Bahlil, mulai kedaulatan energi tanpa intervensi pihak luar hingga penguatan ketahanan energi.

"Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu, kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter, baik solar maupun bensin, dan yang keempat itulah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan akan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada," ucapnya.



Pengangkatan Sumpah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN).

Keanggotaan DEN terdiri dari unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan. Unsur pemerintah mencakup tujuh menteri yang membidangi sektor terkait energi, sementara unsur pemangku kepentingan berjumlah delapan orang yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang energi.



**GOLKAR SOLID
INDONESIA MAJU**





"Harapan kita tentu doa ini memberikan vibrasi positif, kalau kita meyakini di Bali dengan alam sekala niskala, ya semoga saudara-saudara kita yang mengalami musibah itu bisa dikuatkan, dan tentu harapan kita bencana bisa segera berakhir," ujarnya.

Lebih jauh, Udiyana menerangkan simbolik penggunaan 61 genta yang dibunyikan oleh pemangku.

"Makna suara genta, sesuai dengan jumlahnya adalah 61 genta. Kita khushuk memohon kepada Ista Dewata dengan vibrasi suara genta, dengan harapan vibrasi itu bisa sampai kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah agar bencana bisa segera berakhir," harapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bali, pengurus Partai Golkar Kota Denpasar beserta fraksinya, serta kader partai

HUT Ke-61 Tahun, Golkar Bali Pilih Sembahyang Bersama di Pura Jagatnatha

Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Bali ditandai dengan pelaksanaan doa bersama di Pura Jagatnatha Denpasar, Jumat (5/12) malam. Alunan 61 Genta dari 61 Pemangku menciptakan suasana khidmat saat lantunani Doa dipanjatkan oleh ratusan pengurus dan kader Golkar Bali.

Wakil Ketua Bidang Kerohanian DPD Partai Golkar Bali, Ida Bagus Gde Udiyana, menjelaskan bahwa doa bersama lintas agama ini digelar serentak secara nasional dan disiarkan ke seluruh Indonesia dengan tema "Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju"

Ia menuturkan, pelaksanaan doa bersama juga sekaligus menjadi wujud empati atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air.

Terkait perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, DPD I Partai Golkar Provinsi Bali memilih konsep sederhana dan penuh makna dengan menitikberatkan pada kegiatan sosial, bukan acara penuh gegap gempita.

Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan mulai Sabtu hingga Minggu (19–20 Oktober), dengan dengan tema 'Golkar Solid, Indonesia Maju' dan tagline 'Suara Rakyat, Suara Golkar'.



Kegiatan diawali dengan donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pasar murah, pembagian sembako, hingga ziarah ke Taman Pujaan Bangsa (TPB) Margarana dan puncaknya adalah gelar doa bersama di Pura Jagatnatha.

Ketua Panitia, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka alias Gung Cok, mengatakan seluruh kegiatan disusun untuk benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. “Kami ingin HUT ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar memberi makna bagi rakyat,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPD I Golkar Bali, Jalan Surapati No. 9, Dangin Puri, Denpasar Timur, Kamis (16/10) malam.

sementara dalam gelar Pasar murah, Golkar Bali menggelontor 500 paket sembako berisi beras, minyak, dan gula dengan harga setengah dari nilai aslinya.

“Paket senilai seratus ribu kami jual hanya lima puluh ribu, agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Gung Cok. Selain itu, setiap pengunjung akan menerima voucher senilai Rp 25.000 untuk berbelanja di stand UMKM yang turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Pada Senin, 20 Oktober, Golkar Bali menggelar tabur bunga serta pemotongan tumpeng di Taman Pujaan Bangsa Margarana, Tabanan, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.

“Kami ingin mengenang pengorbanan mereka dan memaknai semangat perjuangan itu dalam karya nyata untuk masyarakat,” ujar Tokoh Puri Kerobokan ini. Ketua DPD I Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer,

menegaskan arah kegiatan tahun ini lebih mengutamakan kerja nyata dibanding hura-hura politik. Ia mengatakan, partai tidak ingin menghabiskan anggaran untuk pesta besar, melainkan mengarahkan kegiatan agar berdampak sosial.

“Instruksi dari pusat jelas, bukan seremonial besar-besaran, tapi kerja nyata yang menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Golkar Bali berharap perayaan HUT ke-61 bukan sekadar ajang nostalgia, melainkan momentum memperkuat peran partai dalam kehidupan sosial. Partai yang menjadi kekuatan besar di masa lalu dan kini terus berupaya membangun citra sebagai Partai yang bekerja untuk Rakyat.



DEMER berdialog dengan anak tunanetra yang mendapat bantuan sembako di kegiatan HUT ke-61 Partai Golkar di DPD Partai Golkar Bali, Minggu (19/10/2025). Foto: hen-Pos Merdeka

Hadirkan Pakar dan Akademisi,
GOLKAR BALI GELAR SEMINAR
“MENUJU BALI YANG SUSTAINABLE”

Seminar dibuka langsung Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih diikuti undangan dari berbagai pihak diantaranya unsur pemerintah daerah, KPID Bali, perwakilan BEM universitas di Bali, kaum milenial serta organisasi kemasyarakatan.

Bahkan, seminar ini menghadirkan pakar maupun akademisi yakni **Prof Dr I Gusti Bagus Rai Utama, SE, MMA, MA, MOS, CIRR** (*Manajemen Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan – Bali sebagai Destinasi Kelas Dunia*); **Prof Dr I Komang Gede Bendesa, MADE** (*Bali menuju Pembangunan Sustainable Terpadu*); **Prof Ir Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranatha, MSc, Phd** (*Konsep Pembangunan Bali yang Berkelanjutan*); **Ida Bagus Agung Partha Adnyana**; **Gede Adrian Mahaputra** (*Dari Basa Bali ke Bahasa Promosi: Saat Media dan Gemerlap Pariwisata Mengubah Arah Budaya*); dan **Dr Drs I Gusti Ketut Widana, MSi** (*Bali 2026 – Ampah tanpa Jengah, Campah Benyah*).

Dalam upaya menjaga keberlanjutan Bali di tengah berbagai persoalan berat yang dihadapi, diperlukan penyelesaian cepat dan tepat terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Kondisi yang dihadapi Bali telah mencuat dan menyebar di ruang publik melalui media sosial adalah Isu sampah, keamanan, serta kemacetan.

Hal ini melatarbelakangi DPD Partai Golkar Provinsi Bali menggelar Seminar bertajuk “Membangun Bali yang Sustainable” di Istana Taman Jepun, Denpasar, Rabu (7/1/2026).

Dalam sambutannya, Demer yang juga Anggota DPR RI dari Dapil Bali menegaskan seminar ini merupakan respons Golkar Bali terhadap berbagai persoalan aktual yang tengah dihadapi Bali, mengenai menurunnya kunjungan wisatawan, sampah, kemacetan, banjir, hingga keamanan yang sepatutnya dibahas secara terbuka serta dicarikan solusi bersama.



Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih (Demer) saat membuka Seminar “Membangun Bali yang Sustainable” di Istana Taman Jepun, Denpasar, Rabu (7/1/2026). [Klik gambar diatas untuk terhubung dengan berita video di Youtube](#)



Partai Golkar tegas Demer, selain berinisiatif juga komitmen untuk terus melakukan kajian dan diskusi bersama para akademisi, praktisi, dan profesor yang kompeten, tentunya juga telah melakukan kajian.

“Golkar berinisiatif mengambil program kajian dan diskusi dengan para profesor yang telah bergelut di bidangnya. Nantinya ini akan menjadi sebuah kesimpulan yang kita sampaikan melalui saluran Partai Golkar, yakni Fraksi Partai Golkar,” ungkapnya.

Selengkapnya:
<https://kabarbalihits.com>



KOPI, MIMPI, DAN MENTAL JUARA:

Komitmen Golkar Bali Mencetak Atlet Cup Tasters dan Barista Berkelas Dunia

Aroma kopi menyeruak lembut, memenuhi setiap sudut Wantilan Sekretariat DPD Partai Golkar Bali di Jalan Suradipa, Denpasar, Sabtu, 31 Januari 2026. Wanginya tidak sekadar harum, tetapi hidup—menyatu dengan denyut semangat puluhan anak muda yang berdiri berderet, menggenggam cangkir hitam dan sendok, bersiap menyeruput takdir mereka seteguk demi seteguk.

Satu per satu cangkir dicicipi. Hening sesaat menyelubungi ruangan. Wajah-wajah muda itu tampak tegang namun menyala oleh antusiasme, seolah di balik keputihan uap kopi tersimpan

mimpi menjadi juara. Itulah potret pembuka Golkar Bali Cup Tasters Championship 2026, ajang bergengsi yang digelar DPD Partai Golkar Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gde

Sumarjaya Linggih (Demer) sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bali. Kejuaan ini bukan sekadar lomba. Ia adalah perjalanan panjang yang dirancang bertahap, berawal dari Kota Denpasar sebagai titik mula estafet pencarian talenta, lalu bergerak menyusuri delapan kabupaten se-Bali. Di sembilan kabupaten/kota se-Bali, Golkar Bali membawa pesan yang sama: kompetisi, pembinaan, dan kelahiran generasi cup taster Bali yang siap melangkah lebih jauh—bahkan melampaui batas pulau.

selengkapnya baca
<https://kabarbalisatu.com/>



“ Pertama-tama ya kita terima kasih kepada Pak Gubernur Bali pada program yang bagus untuk salah satu destinasi di Bali. Jadi bisa menjadikan pendapatan Provinsi Bali dan terutama untuk Buleleng juga bahwa Buleleng punya ikon destinasi yang baru. Ya mudah-mudahan lebih banyak bermanfaat buat masyarakat ”



Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali

I GK KRESNA BUDI

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buleleng
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali



Rampungkan Muscam, IGK Kresna Budi Optimis Golkar Buleleng Makin Solid dengan ‘Darah Muda’

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Buleleng, IGK Kresna Budi, memastikan mesin partainya kini semakin solid pasca rampungnya pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) di seluruh wilayah Buleleng.

Kresna Budi mengungkapkan rasa syukurnya karena proses pergantian pengurus di tingkat kecamatan berjalan lancar dan sukses. Menurutnya, Muscam kali ini membuktikan bahwa proses regenerasi di tubuh Partai Golkar Buleleng berjalan dengan sangat baik.

Dari hasil Muscam tersebut, Kresna Budi mencatat adanya penyegaran signifikan dalam struktur kepengurusan. Dari sembilan Pengurus Kecamatan (PK) yang ada di Buleleng, tiga di antaranya kini dipimpin oleh wajah baru. Menariknya, Golkar banyak merekrut kader dari kalangan muda dan pengusaha.

“Artinya regenerasi Partai Golkar berjalan dengan bagus. Kita lihat wajah-wajah baru tampil, pengurus-pengurus Partai Golkar kebanyakan kita rekrut dari anak-anak muda dan pengusaha, biar mereka bisa berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini membawa semangat baru,” ujar Kresna Budi.

Politisi senior ini juga menegaskan bahwa transisi kepemimpinan di tingkat kecamatan berlangsung tanpa gejolak. Ia menyebutkan bahwa Partai Golkar di Buleleng kini telah meninggalkan pola persaingan yang tidak sehat dan beralih sepenuhnya pada prinsip musyawarah mufakat.

“Golkar Buleleng sangat solid. Sudah ada kesadaran bahwa untuk mencapai tujuan harus dengan kekompakan. Tidak ada lagi pemilihan secara gontok-gontokan, semua melalui musyawarah. Bahkan pengurus yang baru ini didukung penuh oleh pengurus lama, sehingga ‘bensinnya’ bertambah dan larinya makin kencang,” jelasnya.

Terkait target politik ke depan dengan komposisi kepengurusan yang baru, Kresna Budi bersikap realistis namun tetap optimis. Fokus utamanya adalah menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan.

“Target kita tidak muluk-muluk. Pertama, mempertahankan kursi yang sudah diraih, karena mempertahankan itu berat juga. Namun astungkara, dengan semangat baru ini kita berharap bisa meningkatkan perolehan kursi di Buleleng,” paparnya.

Selain fokus pada internal partai, Kresna Budi juga menegaskan posisi

Fraksi Partai Golkar dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan Bupati Buleleng, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami dari Fraksi Partai Golkar selalu akan mendukung kebijakan yang diambil, terutama terkait kesehatan dan perbaikan infrastruktur. Kami dukung langkah pemerintah untuk menunjukkan wajah Buleleng yang baru dan lebih bagus,” pungkas Kresna Budi



GOLKAR BANGUN JEMBATAN DI LOKAPAKSA

KRESNA BUDI KOMANDO PASUKAN KUNING

Pasukan berseragam bak semut kuning tampak berjalan beriring berkerumun di sebuah lokasi di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Buleleng.

Rupanya pasukan semut kuning ini tak lain adalah kader partai berlambang pohon beringin, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Buleleng. Mereka turun langsung ke Desa Lokapaksa dibawah komando IGK Kresna Budi Selaku Ketua.

Terjun pasukan kali ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan Golkar Buleleng dalam pembangunan jembatan penghubung anggota kelompok Suka Duka Sawitra Jati menuju Balai Kelompok, pada Senin (27/10/2025).

Menariknya Kades Lokapaksa Putu Dodik Triyana turut hadir dan memohon jaring perangkap sampah untuk di beberapa aliran sungai yang sering dibuang sampah oleh oknum masyarakat.

"Dalam Pengerjaan jembatan untuk balai kelompok, DPD Partai Golkar membantu 10 juta rupiah. Satu titipan kami buat Kresna Budi kedepan kalau ada anggaran kami mohon bantuan jaring sampah, perbanjar akan kami sekat-sekat karena kami di Dinas anggaran tersebut belum tercover di APBDDES" ujar Kades Putu Dodik Triyana

Ida Gede Komang Kresna Budi yang diketahui baru saja terpilih kembali sebagai Ketua DPD Golkar Buleleng secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Buleleng yang digelar Jumat, 12 September 2025 lalu langsung memberi tanggapan,

"Tentu nanti kami siapkan jaring tersebut bekerjasama dengan Suarsana demi desa Lokapaksa bersih dan perang terhadap sampah,"kata Kresna Budi yang dikenal juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bali.

Kresna Budi juga berujar akan bekerjasama dengan DPRD Buleleng dari partai Golkar yang ada di Lokapaksa Ketut Suarsana.

"Ini adalah wujud Golkar Buleleng dalam upaya membangun dan meningkatkan rasa gotong royong dengan melibatkan unsur pemerintah desa dan masyarakat,"papar Kresna Budi.



Pembangunan Jembatan Penghubung GudangKelompok Suka Duka Sawitra Jati, Senin (27/10/2026) Wujud upaya Golkar Buleleng membangun dan meningkatkan rasa gotong royong dengan melibatkan kader Golkar, Pemerintah Desa dan masyarakat.

Dirinya menyampaikan jika rangkaian kegiatan HUT Partai Golkar ke-61 yang diprioritaskan adalah kegiatan yang dapat menyentuh kepentingan masyarakat bawah.

Pria bertubuh kecil dengan nama lengkap Ida Gede Komang Kresna Budi sangat berharap para anggota fraksi Golkar di DPRD Buleleng untuk lebih aktif membangun desa dan wilayahnya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kedepan ini kita sedang Menyusun rencana dan berharap para fraksi Golkar bisa membangun desanya masing-masing,"jelasnya

Sisi lain Kadek Mertada selaku anggota kelompok Suka Duka Sawitra Jati sangat mengapresiasi Golkar telah hadir dimasyarakat Lokapaksa memberikan sentuhan yang bermanfaat untuk menghubungkan Gudang milik suka duka.

"Kami memberi apresiasi kepada Partai Golkar Buleleng dibawah kepemimpinan Kresna Budi atas prihatiannya dalam membangun jembatan untuk Gudang kelompok," ucap Kadek Mertada.

Kemudian dirinya menjelaskan jika dii kelompok Suka Duka Sawitra Jati terdapat 30 orang anggota dengan kondisi ketersediaan barang yang masih terbilang kurang, perlu ada penambahan.

"Nantinya kami berharap semoga dari DPRD Ketut Suarsana bisa membantu memberi tambahan alat suka duka, karena nantinya peralatan tersebut akan kita bisa pinjam pakaikan kepada masyarakat kurang mampu walau bukan anggota suka duka. Seperti yang kita tahu, alat alat suka duka seperti terob dan lainnya sangat mahal sewanya kalau kita bebankan kepada warga kurang mampu sangat kasihan,"kata Mertada.

Sebelumnya untuk kegiatan peringatan HUT Partai Golkar ke 61, DPD Partai Golkar Buleleng telah menggelar acara Pasar Sembako Tebus Murah serta kegiatan sosial lainnya seperti gelar donor darah.

"Pasar Murah yang dilaksanakan di DPD Partai Golkar di jalan Ngurah Rai Singaraja, mendapat antusiasme masyarakat, terbukti pengunjung membludak,"tandas Krisna Budi.



GOLKARPEDIA

Kepengurusan Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih Tegaskan Semua Harus Jadi **"All The Demer's Men"**

Klik untuk kembali ke daftar halaman